

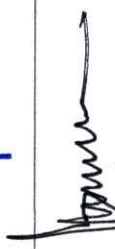
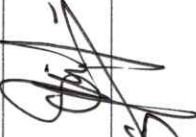
LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI **NOMOR 41 TAHUN 2024**

Pada Hari ini Jumat Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kecamatan Kalaena telah dilakukan pengujian konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana di sebutkan pada table dibawah ini :

Informasi (berisiinformasiter tentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkanjang kawaktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data Pribadi Kependudukan	- UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan - UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tentang administrasi kependudukan - UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan data pribadi	Mengungkapkan data pribadi Melanggar HAM	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Terbatas
Data dan Identitas Pengadu/Pelapor	Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peyelengagara pemerintahan	Menjaga suasana kondusif selama proses penyelesaian aduan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Terbatas

Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Data base PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjiwaan hukuman disiplin PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
Identitas PNS yang melanggar disiplin dan diijazati hukuman disiplin	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/ perkawinan	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Daftar Nilai SKP PNS	UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h PP no. Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbatas
Dokumen laporan keuangan	- UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 21	Dapat terjadi penyalagunaan laporan keuangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	- Memperlancar proses pemeriksaan oleh BPK - Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi di mata publik	Terbatas
Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54/ 2010 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan Proses Pengadaan Barang/Jasa

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang dikecualikan sebagaimana disebut pada table di atas dilakukan oleh :

No.	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1.	H. Marsuki, S.Pd., MM	Camat	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
2.	Burhanudin, SH	Sekretaris	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
3.	Muliani, SE	Kasi Pelayanan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
4.	Sumangerukka, SP	Kasi Trantib	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
5.	Hartati	Kasi Pemerintahan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
6.	I Made Astawa, SE	Kasubag Keuangan Dan Umum	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	
7.	Nursan, S.Sos	Kasubag Perencanaan Dan Kepegawaian	Kec. Kalaena Kab. Luwu Timur	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang dikecualikan ini dibuat seksama dan penuh ketelitian.



H. Marsuki, S.Pd., MM

Pangkat: Pembina Tk.I

NIP. 19691025 199802 1 004